TUGAS KEWARGANEGARAAN

ORMAS HTI DAN PANCASILA

Dosen : Dr. Agustinus Wisnu Dewantara S.S., M.Hum

Oleh :

Hendisius Paulus

(152835)

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

WIDYA YUWANA MADIUN

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai macam golongan, ras, budaya dan agama. Dari latar belakang inilah untuk membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui suatu proses yang memang harus diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau secara kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan suatu tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Pada saat ini kita dapat melihat banyak ormas yang secara terbuka menunjukkan diri ditengah-tengah masyarakat, terutama ormas yang menunjukkan diri dengan sebuah bingkai agama. Membentuk ormas memang bisa kita katakan haknya masyarakat, namun disisi lain jangan sampai ormas yang terbentuk oleh masyarakat menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat itu sendiri, terutama diharapkan ormas-ormas memang harus memberikan kontribusi positif bangsa dan tanah air.

Menurut kacamata saya pribadi, ada ormas yang memang ingin mengobrak abrik pancasila, hal ini dapat saya lihat dari beberapa hal yang diberitakan di televisi, disini penulis ingin menampilkan sebuah kasus atau peristiwa serta ormas yang terpaksa dibubarkan oleh pemerintah, karena tidak sejalan dengan pancasila. Oleh karena itu saya selaku penulis tertarik untuk membahas tema ormas dan pancasila, karena bagi saya sangat penting demi melihat bagaimana bahayanya ormas yang anti pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Ormas

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat memang diakui sebagai bagian HAM yang diatur dalam UUD 1945, sehingga membubarkannya sama halnya melanggar kebebasan dasar manusia. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Secara hakiki, organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu²³ : 23 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 68 25 1) Organisasi dipandang sebagai wadah; 2) Organisasi dapat dipandang sebagai proses; 3) Organisasi sebagai kumpulan orang. Dimas Prayoga,

2.2 Ormas HTI

Obsatar Sinag, (2018: 45-48), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) organisasi yang awalnya bernama Parta Pembebasan Islma (*hizb al-tabrir al-Islami*) yang didirikan pada tahun 1952 di Al-Quds berdasarkan *aqidah* Islam. HTI didirikan oleh Taqiyyuddin an-Nabhani atau dikenal dengan nama Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama, mujtahid, hakim pengadilan (*qadi*) di Palestina dan lulusan al-Azhar Mesir.

Dua tujuan Hizbut Tahrir, pertama melangsungkan kehidupan Islam, kedua mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Berarti tujuan yang ingin dicapai menjadikan seluruh aktivitas kehidupan di atur sesuai dengan hukum-hukum syari’ah serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah

naungan *daulah Islam*. Daulah ini adalah dawlah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang di angkat dan dibai'at oleh umat islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang sudah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta mengemban risahlah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip nasyrah (selebaran) HTI yang bertajug, *Al-Banshasila Falsafah Kufr laa Tattafiq ma'a al-Islaam*. Karena kekufuran ini, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini pengufuran Islam dilandasi dua argumen. Syaiful Arif,

Sementara itu menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (set of philosophy). Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik.

Di samping itu, HT dimaksudkan beraktivitas membangkitkan kembali umat islam dengan kebangkitan yang benar-benar tercerahkan.

2.3 Pancasila sebagai dasar Negara

Negara Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa daerah, agama, ras dan budaya (adat istiadat). Berbeda-beda inilah yang menjadikan latar belakang masyarakat yang majemuk, kemajemukan masyarakat ini menjadi warna-warni yang indah bagi negara Indonesia. Dengan demikian negara Indonesia kaya akan kebudayaan mulai dari bahasa, musik, alat musik, tarian, laut, sumber daya alam, dan lain-lain. Kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia akan diwariskan oleh para generasi pemuda sebagai penerus bangsa untuk dijaga, dilestarikan dan dipelihara dengan baik. Meskipun masyarakat Indonesia berbeda-beda akan tetapi masyarakat Indonesia tetap bersatu dengan dasar negara yang sama yaitu dasar negara "Pancasila". Satu bangsa, satu bahasa itu lah Indonesia. Perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menjadi alasan besar untuk tetap bersatu dalam "Bhineka Tinggal Ika", yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Dr. P.J. Suwarno, S.H. (1993, 108-110) menjelaskan mengenai nilai pancasila sebagai cerimanan sikap bangsa Indonesia. Nilai tersebut tumbuh dari pribadi manusia secara perorangan yang disadari dan dihayati dalam kehidupan bersama. Kesadaran dan penghayatan ini akan menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa,

sehingga mengakar dalam hidup seluruh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang berpancasila tentu akan bertindak sesuai pancasila.

Dr. P.J. Suwarno, S.H. (1993, 108-111) Pancasila merupakan dasar negara yang bersifat menyeluruh dan umum. Sifat-sifat tersebut merupakan hakikat pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. ideologi tersebut yang dijadikan pondasi bangsa Indonesia dalam melaksanakan interaksi sosial ditengah masyarakat. Artinya segala sikap, tindakan dan perbuatan dalam hidup bersama didasarkan pada suatu acuan. Acuan tersebut ialah dasar dari segala sikap bangsa Indonesia dalam hidup bersama yang sudah disepakati secara final. Kesepakatan mengenai pancasila tersebut tidak melalui proses yang tidak singkat melainkan proses yang cukup panjang dan penuh perjuangan. Hal ini membuktikan bahwa pancasila merupakan suatu pikiran, gagasan, wawasan dan ilmu tentang hidup bersama yang ditetapkan serta dijalankan bersama.

2.4 Tindakan yang diambil pemerintah

Menyimak dan mempelajari kasus diatas, pemerintah harus lebih tegas lagi untuk memberikan izin atas berdirinya ormas, karena dari ormas HTI dapat menjadi pelajaran yang bagi bangsa ini. Selanjutnya apakah dengan adanya peristiwa-peristiwa demikian bangsa ini menjadi lebih baik atau malah menimbulkan keresahan, kecurigaan dan kegaduhan ditengah masyarakat.

Dilansir di DetikNews pada Rabu 24 Mei 2017, 14:12 WIB Resmi sudah pemerintah mengumumkan pengusulan pembubaran terhadap organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apresiasi dan sanjungan pun banyak dituai, namun tidak sedikit pula yang kontra atas langkah yang diambil pemerintah dengan dalih sebagai bentuk pemasungan hak asasi manusia (HAM).

HTI yang dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028 .60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Menurut Wiranto (Menpolhukham) ada tiga alasan pembubaran HTI yakni: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang

dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI ini, yaitu:

- 2.4.1 Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
- 2.4.2 Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.
- 2.4.3 Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
- 2.4.4 Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.
- 2.4.5 Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

Ahmad Khadafi, 2017 Sejarah Kemunculan HTI Hingga Akhirnya Dibubarkan,

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat memiliki Hak Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, oleh karena itu hak tersebut di akui bagian dari HAM yang diatur dalam UUD 1945, sehingga membubarkannya sama halnya melanggar kebebasan dasar manusia. Hal ini sebagaimana termaksud di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Namun dibalik kebebasan berpendapat, pemerintah juga tegas akan ormas-ormas yang berseberangan dengan Pancasila atau lebih tegas terhadap ormas yang dapat meresahkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017, sebagai pengaturan ulang dengan apa yang disampaikan di UUD 1945, Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas serta tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yangngg asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini telah memisahkan kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa, HTI adalah salah satu contoh ormas yang harus dibubarkan karena dianggap tidak sesuai dengan pancasila dan tujuan negara.

Pembubaran ormas HTI ini juga dikarenakan tidak relevan ketika mau didirikan di bangsa indonesia yang terbentuk karena berdasarkan pancasila, yang didalamnya banyak keragaman, suku, agama dan budaya. Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijalankan bersama karena sudah menjadi kesepakatan yang mutlak tidak dapat digantikan oleh posisi apapun yang didalamnya sudah mewakili kesatuan bangsa yang memang Bhineka Tunggal Ika.

Daftar pustaka

Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

Ian Montratama, Prayitno Ramela, Obsatar Sinaga. 2018. Terorisme Kanan Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Dewantara, A. W. (2015). PANCASILA SEBAGAI PONDASI PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA. *CIVIS*, 5(1/Januari).

Dewantara, A. W. 2017. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Yogyakarta: Kanisius

Mursanto, Rb Riyo. 1993. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta. Gramedia.

<https://tirto.id/sejarah-kemunculan-hti-hingga-akhirnya-dibubarkan-coiC>,